



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700.1/Kep.686-Insp/2024

LAMPIRAN : 2 (Dua) Lampiran

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700.1/Kep.686-Insp/2024

TANGGAL : 30 Desember 2024

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Reviu Laporan Kinerja;
4. Reviu Laporan Keuangan;
5. *Monitoring* dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
6. Pengawasan Desa;
7. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
9. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
11. Koordinasi, *Monitoring* dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
14. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;

4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;
 - a) Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b) Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c) Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;
8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- a) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b) Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah; dan
- c) Pemberian layanan Konsultasi;

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

1. Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek:

- a) Kebijakan;
- b) Kelembagaan;
- c) Tugas Pokok dan Fungsi;
- d) Pengelolaan Keuangan;
- e) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f) Capaian Kinerja.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b) Penyalahgunaan wewenang;
- c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d) Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian *intern* yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a) Reviu Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RKA Perangkat Daerah);
- b) Reviu Laporan Keuangan;
- c) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d) Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- e) Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan;
- f) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
- h) Reviu Standar Satuan Harga (SSH);
- i) Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- j) Reviu Harga Pokok Satuan (HPS);
- k) Reviu Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- l) Reviu Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Manajemen ASN;
- m) Reviu Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n) Reviu Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- o) Reviu Tata Kelola Pendapatan;
- p) Per Reviu (Telaah Sejawat) *Intern* dan *Ekstern*.

5. Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a) Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP);
- b) Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP;
- c) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah;
- d) Evaluasi Benturan Kepentingan;
- e) Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi/*Monitoring Prevention Center (MCP)*;
- f) *Monitoring* Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- g) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- h) *Monitoring* Dampak Inflasi;
- i) Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- j) Penilaian Mandiri Zona Integritas;
- k) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- l) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- m) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- n) Penanganan Benturan Kepentingan;
- o) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- p) Gelar Pengawasan Daerah.

6. Kegiatan Jasa Konsultansi

Layanan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitas terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

Dengan layanan Konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian *Intern* Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan Asistensi/Pendampingan, meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang

dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian *intern* dan kegiatan asistensi lainnya.

8 Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan revidi secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan
Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2025.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT							Σ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)					(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Peraturan-undangan yang berlaku	Kecamatan	Mg-IV Agustus 2025	Mg-I Oktober 2025	1	4	4	4	4	17	Rp					
1	Audit Kinerja Tematik	Objek Tema Pengendalian Inflasi Daerah	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Bappeltibangda, Disdagin, Dinkop, Distan, DKPP, Bag. Perkonomanian Setda, BKAD	September 2025	September 2025	1	1	1	1	3	7	20	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irbanus Dahis: Iba Purnini Ketua: Mashudi Anggota: 1. Istiyati 2. Suci Setiani 3. Rina Inayati	
2		Objek Tema Pensempahan	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Bappeltibangda, DLH, DPUTR, Dishub, DPMD, BKAD	September 2025	September 2025	1	1	1	1	3	7	20	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irban III Dahis: Rahma Ketua: Anggota: 1. Aninda H 2. Ikke 3. Eika	
3	Monitoring	Monitoring PBB	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Peraturan-undangan yang berlaku	Desa dan Kelurahan yang belum lunas PBB	Oktober 2025	Oktober 2025	1	1	1	1	51	55	12	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irban Dahis: Ketua: Anggota: gabungan Irban	
4	Pendampingan	Pendampingan audit BPK		Perangkat Daerah yang menjadi sampel Audit BPK	mengikuti jadwal audit dari BPK	mengikuti jadwal audit dari BPK					4	4	240	1 laporan	Laptop, ATK	Sedang	UU Mashuri, Olong Masrudin, Cecep, Nurhayati	
Revisi Laporan Kinerja																		
1	Revisi	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Maret 2025	Maret 2025	1	1	1	1	9	13	15	595.380.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	PJ : Pak Iyan WKPJ: Bu Euis DALNIS: Pak Olong KETUA: Arian ANGGOTA: 1. maya 2. Tenny 3. Rudi 4. Taufik 5. Wawan 6. Flowry 7. arie 8. Putri 9. Remi

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2	Reviu	Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD)	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Maret 2025	Maret 2025	1	1	1	1	9	13	10	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irban IV DALNIS: Pak Olong KETUA: Mba Fika ANGGOTA: 1. Diding 2. Koko Komara 3. Tara 4. Johan 5. Ratna 6. Nani 7. Anto 8. Wahib 9. Ena
3	Reviu	Tata Kelola PBJ	Memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.	UKPBJ Sekretariat Daerah	Maret 2025	Maret 2025	1	1	1	1	3	7	6	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Pak Dzul Dalnis: Bu Ina Ketua: H. Herry Anggota: 1. Rusman 2. Kris 3. Andrio
4	Reviu	Reviu RPJMD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa Informasi dalam RPJMD selaras dengan Visi Misi Bupati	Bappeltbangda	April 2025	April 2025	1	1	1	1	10	14	17	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irban III Dalnis: Pak Olong Ketua: Wawan Anggota: 1. Rumini 2. Maya 3. Temy 4. Rudy 5. Ratna 6. Uun 7. Taufik 8. Fika 9. Lina 10. Johar
5	Reviu	TL Reviu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mei 2025	Mei 2025	1	1	1	1	9	13	5	1 Laporan	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Euis DALNIS: Pak Olong KETUA: Arian ANGGOTA: 1. maya 2. Temy 3. Rudi 4. Taufik 5. Wawan 6. Flowry 7. arte 8. Putri 9. Rean

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
6	Reviu	RKPD Murni 2025	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam RKPD berpedoman dengan RPJPD, RPJMD, RKP Nasional, RKPD Provinsi dan selaras dengan Visi Misi Bupati	Bappelitbangda	Mei 2025	Mei 2025	1	1	1	1	9	13	6	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irbani III Dahis: Pak Otong Ketua: Wawan Anggota: 1. Ruminii 2. Maya 3. Temy 4. Rudy 5. Ratna 6. Uun 7. Taufik 8. Fika 9. Lina 10. Jolbar	
7	Reviu	RKPD Perubahan 2025	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam RKPD berpedoman dengan RPJPD, RPJMD, RKP Nasional, RKPD Provinsi dan selaras dengan Visi Misi Bupati	Bappelitbangda	Juni 2025	Juni 2025	1	1	1	1	9	13	5	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irbani III Dahis: Pak Otong Ketua: Wawan Anggota: 1. Ruminii 2. Maya 3. Temy 4. Rudy 5. Ratna 6. Uun 7. Taufik 8. Fika 9. Lina 10. Jolbar	
8	Reviu	Evaluasi Manajemen Risiko dan Reviu Register Risiko	Melakukan pengujian, evaluasi, pelaporan, dan merekomendasikan perbaikan atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko.	Seluruh Perangkat Daerah	Juni 2025	Juni 2025	1	1	1	1	8	12	10	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Eni Dahis: Bu Nung Ketua: Winarso Anggota: 1. Ratna 2. Aninda 3. Putri 4. Endang 5. Rina 6. Flowry	
9	Reviu	Pelayanan Publik	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPKPP, Satpol PP, BPPBD, dan Dinas Damkar	September 2025	September 2025	1	1	1	1	3	7	5	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Dewi Dahis: Pak Juna Ketua: Fika Anggota: (PPUPD) 1. Rudi 2. Ratna 3. Saamsudin	

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dalnis	KT	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
10	Revisi	Revisi P3K	Meyakinkan pelaksanaan pengadaan PPK telah sesuai dengan ketentuan/peraturan/perundang-undangan pada setiap tahapan yang dilakukan oleh Pauselnas dan Pausel Instansi	BKPSDM	September 2025	September 2025	1	1	1	1	2	6	5		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irbani IV Dalnis: Pak Hadi S.Sos Ketua: Pak Uu Anggota: 1. Putri 2. Arie
11	Revisi	Revisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) (6 Dinas)	Menilai pelaksanaan penerapan dan capaian SPM pada perangkat daerah pengampu	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPKPP, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Damkar	Oktober 2025	Oktober 2025	1	1	1	1	3	7	5		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irbani I Dalnis: Olong Ketua: Diding Anggota: (PPUPD) 1. Renin 2. Koko 3. Rumiini
12	Revisi	Rensitra 2025 - 2026	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Rensitra telah disajikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku	Seluruh Perangkat Daerah	Oktober 2025	Oktober 2025	1	1	1	1	12	16	15		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Ibu Eni Dalnis: Ketua: Anggota:
13	Revisi	Revisi PIDN			November 2025	November 2025	1	1	1	1	5	9	5		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irbani I Dalnis: Bu Ina Ketua: Pak Olong Anggota: 1. Arie 2. Fauza 3. Winarso 4. Aninda 5. Isti
14	Revisi	Revisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/ Manajemen ASN	Menilai pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Mengikuti Jadwal Rotasi/ Mutasi/ Promosi Tahun 2023	Mengikuti Jadwal Rotasi/ Mutasi/ Promosi Tahun 2023	1	1	1	1	3	7	5		1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irbani IV Dalnis: Pak Hadi S.Sos Ketua: Tri Kania Anggota: 1. Arie 2. Putri 3. Adian 4. Temi 5. Rumiini

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang lingkup	Jadwal		HP					Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
Revisi Laporan Keuangan																	
1	Revisi	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Januari 2025	Januari 2025	1	1	1	1	10	14	15	Rp 449,205,000	1 LHP ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Ibu Eni DALNIS: Ibu Ina KETUA: Ibu Nunung ANGGOTA: 1. Tri Kania 2. Nurhayati 3. Ani L 4. Winarso 5. Mashudi 6. Tomas K 7. Tria O 8. Flowry 9. Suci 10. Furi
2	Revisi	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	10 Proyek Strategis	Maret 2025	Maret 2025	1	1	1	1	3	7	6	1 LHP ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Irbah III Dalnis: Rahma Ketua: Nurhayati Anggota: 1. Nani 2. Cecep 3. Johan	
3	Revisi	Revisi Penyusunan Anggaran	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan bansos telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	April, Juli, Okt, Des 2025	April, Juli, Okt, Des 2025	1	1	1	1	2	6	20	1 LHP ATK	Tinggi	PJ: Pak Iyan WKPJ: Pak Dzul Dalnis: Bu Ina Ketua: Tomas Anggota: 1. Tri Kania 2. Nurhayati	
4	Revisi	Revisi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Murni 2025	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA-PPAS telah disusun berdasarkan RKPJ atas kesesuaian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pencahutan indikator dan target kinerja serta pagu inikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPJ, dan kesesuaian plafon anggaran sementara pendapatan dan	BKAD, Bappeltbangda	Mei 2025	Mei 2025	1	1	1	1	8	12	10	1 LHP ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Eni Dalnis: Bu Ina Ketua: Nunung Anggota: 1. Ani 2. Tri Kania 3. Winarso 4. Maya 5. Tria 6. Fitria 7. Rumiini	
5	Revisi	Revisi Analisa Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2025	Mei 2025	1	1	1	1	3	7	6	1 LHP ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Dewi Dalnis: Pak Jana Ketua: Rahma Anggota: 1. Ratna 2. Fika 3. Masno	

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
6	Reviu	Reviu Dana Transfer	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana transfer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2025	Mei 2025	1	1	1	1	3	7	5	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pj: Pak Iyan WKPl: Bu Mira Dahis: Pa Olong Ketua: Jubacdi Anggota: 1. Nurhayati 2. Ayu Rizki 3. Maya
7	Reviu	Reviu Bantuan Keuangan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan bantuan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2025	Mei 2025	1	1	1	1	3	7	5	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pj: Pak Iyan WKPl: Bu Mira Dahis: Pak Olong Ketua: Jubacdi Anggota: 1. Diding 2. Fauza 3. Tara
8	Reviu	Reviu Hibah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan hibah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2025	Mei 2025	1	1	1	1	3	7	5	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pj: Pak Iyan WKPl: Bu Eni Dahis: Bu Nung Ketua: Winarso Anggota: 1. Endang 2. Flowry 3. Tara
9	Reviu	Reviu Bansos	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan bansos telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mei 2025	Mei 2025	1	1	1	1	3	7	5	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pj: Pak Iyan WKPl: Pak Dzul Dahis: Bu Ina Ketua: Tomas Anggota: 1. Rina 2. Wanti 3. Suci
10	Reviu	Reviu Standar Satuan Harga (SSH)	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Junii 2025	Junii 2025	1	1	1	1	3	7	6	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Pj: Pak Iyan WKPl: Bu Eni Dahis: Bu Nung Ketua: Arian Anggota: 1. Ani 2. Flowry 3. Andrio

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KR	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
11	Reviu	Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2025	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA-PPAS telah disusun berdasarkan RKPD atas kesesuaian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pemantuan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPD, dan kesesuaian plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja dalam rancangan PPAS dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 serta Rancangan KUA Daerah TA 2025	BKAD, Bappelitbangda	Julii 2025	Julii 2025	1	1	1	1	1	7	11	5	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Eni Dahis: Bu lna Ketua: Nunung Anggota: 1. Ani 2. Tri Kania 3. Winarso 4. Maya 5. Tria 6. Fitria 7. Rumini
12	Reviu	Reviu RKA Murni 2025	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, Pagu Anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya	BKAD, Bappelitbangda	Agustus 2025	Agustus 2025	1	1	1	1	1	12	16	10	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Eni Dahis: Bu lna Ketua: Arian Anggota: 1. Tomas 2. Tri Kania 3. Ani L 4. Asep Hendra 5. Futi 6. Rumini 7. Temi 8. Ikke 9. Arte 10. Adian 11. Suci 12. Rudi
13	Reviu	Reviu RKA Perubahan 2025	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, Pagu Anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya	BKAD, Bappelitbangda	September 2025	September 2025	1	1	1	1	1	10	14	10	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Eni Dahis: Hadi, S.Sos Ketua: Tri Kania Anggota: 1. Ani L 2. Asep Hendra 3. Futi 4. Endang 5. Ikke 6. Arie 7. Adian 8. Suci 9. Rudi 10. Temi

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang lingkup	Jadwal		HP					Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT							Σ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
14	Revisi	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	setiap Triwulan 2025	setiap Triwulan 2025	1	1	1	1	8	12	40	4 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	PJ: Pak Iyan WKPJ: Bu Eni Dahis: Bu Nung Ketua: Arhan Anggota: 1. Mashudi 2. Tri Kania 3. Tomas 4. Nurhayati 5. Anto 6. Isti 7. Winarso 8. Diding	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP																		
1	Evaluasi dan Monitoring	Tindak Lanjut dan Pemantauan Hasil pemeriksaan APJP/Inspektorat	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Perangkat Daerah yang terkait	Jan-Des 2025	Jan-Des 2025	1	1	1	4	14	21	300	1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	TIM SEKRETARIAT	
2	Evaluasi dan Monitoring	Tindak Lanjut dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Perangkat Daerah yang terkait	Jan-Des 2025	Jan-Des 2025	1	1	1	1	3	7	80	1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	TIM IREANSUS	
Penguasaan Desa																		
1	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketepatan)	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024 (Tahap I)	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Desa yang pelantikan Kuwu di Bulan Desember 2023.	Januari-Maret 2025	Januari-Maret 2025	1	4	4	12	36	57	50	Rp 2.406.360.000	120 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IREBAN I s.d IV (Tiap Irban 3 Tim)
				KEC. ARJAWINANGUN 1. Desa Kebonturi 2. Desa Tegayutubug KEC. KARANGSEMBUNG 1. Desa Karangsuwung 2. Desa Kutangkarang 3. Desa Karangsembung														

No (1)	Jenis Pengawasan (2)	Area Pengawasan (3)	Tujuan/ Sasaran (4)	Ruang Lingkup (5)	Jadwal		HP					Jumlah Hari	Anggaran (Rp) (8)	Jumlah Laporan (9)	Sarana dan Prasarana (10)	Tingkat Risiko (11)	Ket (12)
					RMP (6)	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT						
				KEC. TENGAHTANI 1. Desa Kalitengah 2. Desa Kalihbaru 3. Desa Kenhacade KEC. JAMBLANG 1. Desa Bakung Lor 2. Desa Bojong Lor KEC. LOSARI 1. Desa Ambulu 2. Desa Barisan 3. Desa Kalisari 4. Desa Losari Kidul 5. Desa Losari Lor 6. Desa Tawang Sari 7. Desa Mubasari KEC. GREGED 1. Desa Kanarung 2. Desa Lebakmekar KEC. SEDONG 1. Desa Sedong Kidul 2. Desa Panambangan KEC. PALIMANAN 1. Desa Balerante 2. Desa Lungpenda 3. Desa Beberan KEC. DEPOK 1. Desa Kasugengan Kidul 2. Desa Warugede KEC. BABAKAN 1. Desa Babakangebang 2. Desa Cangkuang 3. Desa Karangwangun 4. Desa Sumberlor KEC. PABUARAN 1. Desa Pabuaran Lor KEC. WERU 1. Desa karangsari 2. Desa Setu Wetan 3. Desa Tegaltwangi 4. Desa Setu Kulon KEC. KLANGENAN 1. Desa Slangit 2. Desa Serang KEC. KALIWEDE 1. Desa Guwa Kidul 2. Desa Klatiwedi Lor 3. Desa Warabihangun KEC. PANGENAN 1. Desa Bendungan 2. Desa Japura Lor KEC. PANGURAGAN 1. Desa Guyeg 2. Desa Kalanyar 3. Desa Panguragan KEC. KARANGWARENG 1. Desa Karangasem 2. Desa Karangwareng													

No (1)	Jenis Pengawasan (2)	Area Pengawasan (3)	Tujuan/Sasaran (4)	Ruang Lingkup (5)	Jadwal		HP					Jmlh Hari	Anggaran (Rp) (8)	Jumlah Laporan (9)	Sarana dan Prasarana (10)	Tingkat Risiko (11)	Ket (12)
					RMP (6)	RPL	PJ (7)	WK PJ	Dnlms KT	Ar Σ							
				KEC. PABEDILAN 1. Desa Babakan Losari 2. Desa Babakan Losari Lor 3. Desa Dukuhwidara 4. Desa Kalimukti 5. Desa Kalibuntu 6. Desa Pabedian Wetan 7. Desa Pasuruan 8. Desa Tersana													
				KEC. GEGESIK 1. Desa Bayalangu Lor 2. Desa Jagapura Lor 3. Desa Kedungdalem													
				KEC. PLUMBON 1. Desa Kedungsana 2. Desa Pamulihan													
				KEC. PASALEMAN 1. Desa Cigobang													
				KEC. KEDAWUNG 1. Desa Kedungdawa 2. Desa Kedungelava													
				KEC. CIWARINGIN 1. Desa Galaganba 2. Desa Gintung Kidul 3. Desa Budur 4. Desa Ciwaringin 5. Desa Gintung Ranyeng 6. Desa Babakan													
				KEC. CILEDUG 1. Desa Jatiseung 2. Desa Damayana													
				KEC. PLERED 1. Desa Cangkring 2. Desa Gammel 3. Desa Panembahan 4. Desa Wotgali 5. Desa Trusmi Kulon													
				KEC. TALUN 1. Desa Cirebon Girang 2. Desa Wanayasa Lor													
				KEC. ASTANAJAPURA 1. Desa Astanajapura 2. Desa Japura Kidul 3. Desa Mertapada Wetan													
				KEC. SUSUKAN 1. Desa Jatanom 2. Desa Ujunggebang 3. Desa Gintung Lor 4. Desa Kedondong													
				KEC. GEBANG 1. Desa Gebanglit 2. Desa Gebangmekar 3. Desa Melakasari													
				KEC. LEMAHABANG 1. Desa Lemahabang 2. Desa Wanukelaur													

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan /Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dalnis	KT	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
				KEC. GEMPOL 1. Desa Cupang 2. Desa Cikusal 3. Desa Kedunbunder KEC. SURANENGALA 1. Desa Purwawingun 2. Desa Surenggala KEC. KAPETAKAN 1. Desa Kapetakan 2. Desa Pegagan Lor KEC. BEBER 1. Desa Kondangsari 2. Desa Cikancas KEC. WALED 1. Desa Ambit 2. Desa Cibogo 3. Desa Cikulak 4. Desa Cikulak Kidul 5. Desa Cisaat 6. Desa Gunungsari 7. Desa Waledkota 8. Desa Kanusari KEC. MUNDU 1. Desa Setupatok 2. Desa Suci KEC. GUNUNGJATI 1. Desa Grogol 2. Desa Klavan KEC. SUSUKANLEBAK 1. Desa Curing 2. Desa Kaligawe 3. Desa Kaligawe Wetan 4. Desa Wilulang KEC. DUKUPUNTANG 1. Desa Dukupuntang 2. Desa Kepunduan 3. Desa Sindangjawa 4. Desa Balad KEC. SUMBER 1. Desa Sidawangi														
2	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024 (Tahap II)	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan dan Aset Desa dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Desa yang dipertaka 2024 dengan teman pengembalian > 100 Jt - Desa yang masuk Zona Kuning dan Merah	April-Juni 2025	April-Juni 2025	1	4	4	12	36	57	50	84 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN I s.d IV (Tiap Irban 3 Tim)	
				KEC. ARJAWINANGUN 1. Desa Geyongan 2. Desa Junggang Wetan 3. Desa Junjang KEC. KARANGSEMBUNG 1. Desa Karangmekar KEC. JAMBIANG 1. Desa Bakung Kidul 2. Desa Jambiang 3. Desa Wanunharja														

No Pengawasan (1)	Jenis (2)	Area Pengawasan (3)	Tujuan/Sasaran (4)	Ruang lingkup (5)	Jadwal		HP					Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana (10)	Tingkat Risiko (11)	Ket (12)
					RMP (6)	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	Ar	Σ					
				KEC. LOSARI 1. Desa Kalirahayu KORWIL GREGED 2. Desa Karangrejahak 3. Desa Nanggela 4. Desa Sindangkempong													
				KEC. SEDONG 1. Desa Panongan Lor 2. Desa Putat													
				KEC. PALIMANAN 1. Desa Cengkung 2. Desa Panongan 3. Desa Sembo													
				KEC. DEPOK 1. Desa Karangwangi 2. Desa Ketiden													
				KEC. BABAKAN 1. Desa Kudukeras 2. Desa Pakusambeng													
				KEC. PABUARAN 1. Desa Jatitenggang													
				KEC. WERU 1. Desa Megude 2. Desa Wetu Kidul 3. Desa Wetu Lor													
				KEC. KLANGENAN 1. Desa Bangodua 2. Desa Kreyo 3. Desa Lemmas Lor													
				KEC. KALIWEDI 1. Desa Guwa Lor													
				KEC. PANGENAN 1. Desa Pengargan 2. Desa Beringin 3. Desa Gentrakmoyan 4. Desa Rakawito													
				KEC. PANGURAGAN 1. Desa Karanganyar 2. Desa Lemahambah 3. Desa Panguragan Kulon													
				KEC. KARANGWARENG 1. Desa Kubangdeleg 2. Desa Sumurkondang													
				KEC. GEGESIK 1. Desa Jagapura Kulon 2. Desa Sibubut													
				KEC. PLUMBON 1. Desa Karangmulya 2. Desa Purbawinangun													
				KEC. PASALEMAN 1. Desa Tanjunganom 2. Desa Tonjong													
				KEC. KEDAWUNG 1. Desa Kalikoa 2. Desa Kertawinangun 3. Desa Suawinangun													

No (1)	Jenis Pengawasan (2)	Area Pengawasan (3)	Tujuan/Sasaran (4)	Ruang Lingkup (5)	Jadwal (6)		HP (7)					Jmlh Hari	Anggaran (Rp) (8)	Jumlah Laporan (9)	Sarana dan Prasarana (10)	Tingkat Risiko (11)	Ket (12)
					RMP (6)	RPL	PJ PJ	WK PJ	Dalnis KT	AT	Σ						
				KEC. CILEDUG 1. Desa Ciledug Kulon 2. Desa Tenjolomaya KEC. PLERED 1. Desa Sarabau 2. Desa Tegalsari KEC. ASTANA/APURA 1. Desa Bunet 2. Desa Kanci 3. Desa Kanci Kulon 4. Desa Mertapada Kulon 5. Desa Sidanmulya													
				KEC. SUSUKAN 1. Desa Jatipura 2. Desa Susukan													
				KEC. GEBANG 1. Desa Gebang 2. Desa Gebang Kulon 3. Desa Kalipsung													
				KEC. LEMAHABANG 1. Desa Leuwidingding 2. Desa Saraiaya KEC. GEMPOL 1. Desa Gempol 2. Desa Kempek 3. Desa Palimanan Barat 4. Desa Winong													
				KEC. SURANENGGAJA 1. Desa Muara 2. Desa Surakarta 3. Desa Suranenggala Lor 4. Desa Karangreja													
				KEC. KAPETAKAN 1. Desa Dukuh 2. Desa Grogol 3. Desa Karangkendal													
				KEC. WALED 1. Desa Ciuyah 2. Desa Walddesa													
				KEC. MUNDU 1. Desa Mundumesigit 2. Desa Pamengkang													
				KEC. GUNUNGJATI 1. Desa Adhidarma 2. Desa Jadimulya 3. Desa Jatimerta 4. Desa Kalisapu 5. Desa Sirabaya													
				KEC. SUSUKANLEBAK 1. Desa Susukanlebak													

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dalmis	KR	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	Audit Kinerja	Pengelolaan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2024	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan pada BUMDES telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penentuan objek pemeriksaan ditentukan kemudian hari berdasarkan hasil penilaian risiko dan pertimbangan manajemen lainnya. (Rencana desa)	Julri 2025	Julri 2025	1	1	1	1	3	7	10		2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
1	Audit Investasi	Pemeriksaan Tunjutan Ganti Rugi dan Pertembendaharaan	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai pada penjabaran hukuman berjalan secara efektif	Perangkat Daerah yang terkait	10 bulan	10 bulan	1	1	1	1	2	6	150		10 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanus
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu														2.352.090.000,00				
1	Riksus	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Menyesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.	Pengaduan Masyarakat yang masuk	Jan-Des 2025	Jan-Des 2025	1	1	1	3	6	12	300		36 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanus
2	Pembinaan	Pembinaan Kepala OPD, Camat, Kepala SD, SMP, Kepala Desa	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan-undangan yang berlaku	Kepala OPD, Camat, Kepala SD, SMP, Kuwu, BPD, Koorwilbidikcam	Jan s.d Des 2025	Jan s.d Des 2025									1 laporan	Laptop, ATK	Sedang	Sekretariat
3	Asistensi/ Pendampingan	Pemantauan Desa Anti Korupsi	Mendampingi dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya di tingkat desa.	Desa Panambungan Kec. Sedong, Desa Panongan Kec. Palimanan dan Desa Kedawang Kec. Kedawang	Marret, Juni, September, Desember 2025	Marret, Juni, September, Desember 2025									1 laporan	Laptop, ATK	Sedang	Irbanus/ Penyuluh anti korupsi
4	Evaluasi dan Monitoring	Unit Pengendali Gratifikasi	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Cirebon rencana kerja yang sudah disusun oleh Tim UPG Kabupaten Cirebon	Seluruh Perangkat Daerah	Marret, Juni, Sept, Des 2025	Marret, Juni, Sept, Des 2025									1 Laporan	Laptop, ATK	Sedang	Tim UPG
5	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Pengelolaan Keuangan pada Kelurahan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan-undangan yang berlaku	12 Kelurahan di Kecamatan Sumber	Marret 2025	Marret 2025	1	1	1	1	2	6	60		12 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanus (1 tim)
6	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Audit IT SPBE	Menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan atau standar yang telah ditetapkan, termasuk peraturan perundangan yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika	April 2025	April 2025	1	1	1	1	2	6	5		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPI: Pak Dzul Dalnis: Bu Ira Ketua: Pak Tomas Anggota: 1. Soko 2. Anto 3. Rahma

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dalnis	KT	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7	Audit Tujuan Tertentu (Probiy Audit)	Probiy Audit	Memlii proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	Perangkat Daerah yang menjadi saample (5 Proyek Strategis dibentuk 5 Tim)	Mei 2025	Mei 2025	1	5	5	5	10	26	6		5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III, IV dan Irbansus (per Irbn 1 Tim)
8	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Pengelolaan Dana BOSP SMPN	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Peraturan-undangan yang berlaku	1. SMPN 2 Arjawinangun 2. SMP Satu Atap Negeri Karangsembung 3. SMPN 2 Losari 4. SMP Negeri Satu Atap Losari 5. SMPN 1 Grogged 6. SMPN 2 Grogged 7. SMPN 1 Sedong 8. SMPN 2 Sedong 9. SMPN 2 Karangsembung	Jun-i-Juli 2025	Agustus 2025	1	1	1	3	6	12	9		9 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN I
				1. SMPN 2 Klangenan 2. SMP Satu Atap Negeri Karangwareng 3. SMPN 1 Pangenan 4. SMPN 2 Pangenan 5. SMPN 2 Kaliwedl 6. SMPN 1 Gegesik 7. SMPN 1 Pabuaran 8. SMPN 1 Pabedllan 9. SMPN 1 Pangunungan	Jun-i-Juli 2025	Agustus 2025	1	1	1	3	6	12	9		9 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN II
				1. SMPN 3 Plered 2. SMP Satu Atap Negeri Tahun 3. SMPN 2 Gebang 4. SMPN 1 Kedawung 5. SMPN 1 Ciwaringin 6. SMPN 1 Ciledug 7. SMPN 2 Plered 8. SMPN 1 Lemahabang 9. SMPN 1 Astanajapura	Jun-i-Juli 2025	Agustus 2025	1	1	1	3	6	12	9		9 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN III
				1. SMPN 2 Gempol 2. SMPN 2 Surarengala 3. SMP Satu Atap Negeri Waled 4. SMPN 2 Mundu 5. SMPN 2 Susukanlebak 6. SMPN 1 Mundu 7. SMPN 2 Gunungjati 8. SMPN 1 Dukupuntang 9. SMPN 1 Beber	Jun-i-Juli 2025	Agustus 2025	1	1	1	3	6	12	9		9 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN IV

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				KOORWIL PANGENAN 1. SDN 1 Getrakmoyan 2. SDN 2 Ender KOORWIL PANGURAGAN 1. SDN 1 Panguragan 2. SDN 1 Lemahambah													
				KOORWIL, KARANGWARENG 1. SDN 1 Kubangdeleg 2. SDN 2 Kubangdeleg KOORWIL, PABEDILAN 1. SDN 1 Pabedian Wetan 2. SDN 1 Pasuruan													
				KOORWIL, GEGESIK 1. SDN 1 Gegesik Wetan 2. SDN 2 Jagapura Lor 3. SDN 2 Jagapura Kidul													
				KOORWIL, PLUMBON 1. SDN 1 Lurah 2. SDN 1 Pasanggrahan 3. SDN 2 Marikangen KOORWIL, PASALEMAN 1. SDN 1 Cilengkranggrang 2. SDN 1 Tonjong	Jul- Agustus 2025	Agustus 2025	1	1	1	3	6	12	18	24 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN III
				KOORWIL, KEDAWUNG 1. SDN 1 Kedungdawa 2. SDN 3 Kertawinangun													
				KOORWIL, CIWARINGIN 1. SDN 1 Budur 2. SDN 1 Galagamba 3. SDN 2 Galagamba KOORWIL, CILEDUG 1. SDN 1 Leuweunggajah 2. SDN 1 Tenjonaya													
				KOORWIL, PLERED 1. SDN 1 Trusmi Kulon 2. SDN 2 Sarabau 3. SDN 3 Pancumbahan KOORWIL, TALUN 1. SDN 1 Cirebon Girang 2. SDN 2 Wanasaba Kidul 3. SDN 3 Saupitan													
				KOORWIL, ASTANAJAPURA 1. SDN 2 Buntet 2. SDN 2 Kancikulon													
				KOORWIL, SUSUKAN 1. SDN 2 Jatanom 2. SDN 3 Kedondong KOORWIL, GEBANG 1. SDN 1 Gebang 2. SDN 1 Kalipasing													

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				KOORWIL LEMAHABANG 1. SDN 1 Sindanglaut 2. SDN 2 Lemahabang 3. SDN 3 Cipeujeuh Wetan														
				KOORWIL GEMPOL 1. SDN 1 Gempol 2. SDN 2 Kedungbunder	Juli- Agustus 2025	Agustus 2025	1	1	1	3	6	12	18	24 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN IV	
				KOORWIL SURANENGALA 1. SDN 1 Suranenggala Kidul 2. SDN 2 Suranenggala Lor														
				KOORWIL KAPETAKAN 1. SDN 2 Karangkendal 2. SDN 3 Kertasura 3. SDN 4 Pagaan Kidul														
				KOORWIL BEBER 1. SDN 2 Ciawigajah 2. SDN 3 Beber														
				KOORWIL WALED 1. SDN 1 Cikulak Kidul 2. SDN 1 Karang Sari 3. SDN 1 Waledlesa														
				KOORWIL MUNDU 1. SDN 1 Suci 2. SDN 2 Mundupesisir 3. SDN 3 Mundupesisir														
				KOORWIL GUNUNGJATI 1. SDN 2 Mayung 2. SDN 3 Bayut 3. SDN 4 Klayan														
				KOORWIL SUSUKANLEBAK 1. SDN 1 Ciawasih 2. SDN 1 Susukanagung														
				KOORWIL DUKUPUNTANG 1. SDN 2 Cisaat 2. SDN Kepunduan														
				KOORWIL SUMBER 1. SDN 1 Pasalakan 2. SDN 1 Sidawanul														
10	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	IT PBJ	Menilai ketaatan/ kepatuhan pelaksanaan pengadaan secara elektronik terhadap Perundang-undangan yang berlaku	UKPBJ Sekretariat Daerah	Agustus 2025	Agustus 2025	1	1	1	1	2	6	5	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	PJ: Pak Iyan WKPU: Pak Dzul Dahis: Bu Ina Ketua: Pak Tomas Anggota: 1. Soko 2. Anto 3. Rahma	
11	Audit Tujuan Tertentu (Audit Pendapatan)		Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinkes, Dishub, DLH, Dispora, Disperdag, Disistan, Bappeda, DP/UTR, Distaker, DKPP, BKAD	Oktober 2025	Oktober 2025	1	1	1	1	3	7	6	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang		

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dnlis	KT	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
12	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)		Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Ketenagakerjaan, DPPKBP3A, Disdik, Dishub, Dinsos	Okt-Nov 2025	Okt-Nov 2025	1	1	1	2	4	9	15		2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN I (2 tim)
13			Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	DPMP/ISP, Kesbangpol, Disdagm, Dinkop, Distasi	Okt-Nov 2025	Okt-Nov 2025	1	1	1	2	4	9	15		2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN II (2 tim)
14			Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Diskominfo, Saipol PP, Bappelitbangda, Disbudpar	Okt-Nov 2025	Okt-Nov 2025	1	1	1	2	4	9	15		2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN III (2 tim)
15			Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Serda (Bag. Pemerintahan, Adipem, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan)	Okt-Nov 2025	Okt-Nov 2025	1	1	1	2	4	9	15		2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN III (2 tim)
16			Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Ketahanan Pangan, Dispora, BKPSDM, Damkar, BPBD, Disarpus	Okt-Nov 2025	Okt-Nov 2025	1	1	1	2	4	9	15		2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	IRBAN IV (2 tim)
17	Audit Tujuan Tertentu (Audit PBJ)		Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Perangkat Daerah di wilayah IRBAN I	November 2025	November 2025	1	1	1	2	4	9	15		2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	IRBAN I (2 tim)
18			Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Perangkat Daerah di wilayah IRBAN II	November 2025	November 2025	1	1	1	2	8	13	15		2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	IRBAN II (2 tim)
19			Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Perangkat Daerah di wilayah IRBAN III	November 2025	November 2025	1	1	1	2	8	13	15		2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	IRBAN III (2 tim)
20			Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Perangkat Daerah di wilayah IRBAN IV	November 2025	November 2025	1	1	1	2	8	13	15		2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	IRBAN IV (2 tim)
21	Evaluasi dan Monitoring	Evaluasi Benturan Kepentingan	Mengevaluasi pengelolaan penanganan benturan kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal pada instansi pemerintah	Perangkat Daerah yang terkait	Desember 2025	Desember 2025	1	1	1	1	2	6	5		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
22	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Stock Opname dan Cash Opname	Melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek antara laporan akuntansi dengan realitanya	Seluruh Perangkat Daerah (31 OPD + 40 Kecamatan)	Desember 2025	Desember 2025	1	4	4	12	37	58	6		12 LHP	Laptop, ATK	Sedang	IRBAN I s.d IV (masing-masing Irban 3 tim)

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT	Σ							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)			(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
1	Sosialisasi	Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)	Meningkatkan kesadaran dan peran secara individu maupun kelompok dalam kegiatan anti korupsi	Inspektorat	Nov-Des 2025	Nov-Des 2025								Rp	228.965.400		Laptop, ATK	Rendah	Sekretariat
2	Evaluasi dan Monitoring	Gelar Pengawasan Daerah	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi terhadap hasil pengawasan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Seluruh Perangkat Daerah	Desember 2025	Desember 2025										1 Laporan	Laptop, ATK	Rendah	Sekretariat
3		Pencanangan Desa Anti Korupsi	Mewujudkan program antikorupsi, sehingga pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan transparan serta menyejahterakan masyarakat	40 Desa Antikorupsi	Desember 2025	Desember 2025											Laptop, ATK	Rendah	Tim Penyulu Anti korupsi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan																			
1	Penguatan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	Penilaian Kapabilitas APIP	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	Inspektorat	Jan-Juni 2025	Jan-Juni 2025								Rp	161.453.000		1 Laporan ATK	Rendah	Tim PK APIP
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
1	Asistensi/ Pendampingan	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Menilai kegiatan sapu bersih pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja dan sarana prasarana	Unit Sabar Pungli	Jan-Des 2025	Jan-Des 2025								Rp	511.217.700		1 laporan ATK	Sedang	Satgas Sabar Pungli
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			
2	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi LHKPN	Melakukan pemantauan atas pengisian LHKPN yang dilakukan oleh para PN/WL telah sesuai dengan data yang sebenarnya	Seluruh Perangkat Daerah	Tw-IV Jan-Mar 2025	Tw-IV Jan-Mar 2025								Rp	212.399.900		1 Laporan ATK	Rendah	Sekretariat

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dahis	KT	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Evaluasi	Evaluasi SIMONA	Melakukan monitoring pelaksanaan analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, anggaran dan penerapan tambahan penghasilan pegawai di pemerintah daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Mg-I Februari 2025	Mg-II Februari 2025								1 Laporan ATK	Rendah	Sekretariat		
5	Asistensi/Penda mpingan	Survei Penilaian Persepsi Anti Korupsi	Menilai dan mengukur tingkat indeks integritas melalui metode survei yang dilaksanakan oleh KPK pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.	Seluruh Perangkat Daerah	Juni 2025	Juni 2025								1 Laporan ATK	Rendah	Irbansus		
3	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi SPP	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaraan SPP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	Seluruh Perangkat Daerah	Juli 2025	Juli 2025	1	1	1	1	16	20	5	1 Laporan ATK	Rendah	Irbhan III (Tim SPP)		
4	Revisi	Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG	Seluruh Perangkat Daerah	Agustus 2025	Agustus 2025	1	1	1	1	3	7	5	1 LHR ATK	Rendah	Sekretariat		
6	Asistensi/ Penda mpingan	Pendampingan Manajemen Risiko	Pendampingan dalam penentuan permasalahan dan konteks risiko pada tiap kegiatan, menyusun indentifikasi risiko, penentuan analisis dan prioritas risiko, pelaksanaan penerapan manajemen risiko, pelaksanaan evaluasi risiko, pemantauan berkelanjutan dan telah ulang, serta koordinasi dan komunikasi dengan penanganan risiko	Seluruh Perangkat Daerah	Desember 2025	Desember 2025								1 Laporan ATK	Rendah	Irbhan III		

No	Jenis Pengawasan	Area Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Jmlh Hari	Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dalnis	KT	AT	Σ						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
1	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Bimtek Siswaskendes, Diklat Pengelolaan Keuangan Desa)	Meningkatkan kompetensi APP dalam melaksanakan tugas dan perannya	Pegawai Inspektorat	Jan-Des 2025	Jan-Des 2025							Rp 1.677.960.000		Laptop, ATK	Rendah	semua pegawai Inspektorat	
Pendamplangan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
2	Penilaian	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMIPZ)	Menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan instansi pemerintah	Perangkat Daerah yang terkait	Apr-Jun 2025	Apr-Jun 2025							Rp 49.700.000	1 laporan	Laptop, ATK	Rendah		Irban I
1	Evaluasi/ Penilaian	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Menilai secara keseluruhan kinerja terkait kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah	Perangkat Daerah yang terkait	Oktober 2025	Oktober 2025									1 Laporan ATK	Rendah	Irban I	
Pendamplangan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas																		
1	Sosialisasi	Sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi	Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi, menciptakan budaya anti gratifikasi dalam diri pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara, mencegah agar tidak terjadi konflik kepentingan, dalam rangka membangun integritas pegawai	Seluruh Perangkat Daerah	Setiap bulan (1 kali x 12 bulan), dibagi 4 tim	Setiap bulan (3 kali)							Rp 283.050.000	1 laporan	Laptop, ATK	Sedang	Tim Penyuluh Anti korupsi dan Kejaksaan	

PJ. BUPATI CIREBON,

WAHYU MUJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj Bupati Cirebon.
Dari : Inspektur Kabupaten Cirebon.
Nomor : 700.1/2862-Sekrt
Tanggal : 22 November 2024
Lampiran : 2 (Dua) Lampiran
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Perubahan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka Penyusunan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Perubahan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami memohon perkenan Bapak untuk menandatangani dokumen ini.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si. CGCAE., CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661209 199312 1 002